2025

RENCANA AKSI ATAS KINERJA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN



SETWAN KAB. PANGANDARAN setwanpangandaran@gmail.com dprd.pangandarankab.go.id **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan

karunia-Nya penyusunan Laporan Pengukuran Rencana Aksi Tahun 2025 pada

Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dapat diselsaikan. Laporan Rencana

Aksi merupakan sarana perencanaan kinerja dalam rangka mengimplementasikan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan

tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan

pada Tahun 2025.

Dengan disusunnya rencana aksi ini diharapkan seluruh pegawai Sekretariat

DPRD mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan baik.

Laporan rencana aksi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Insyansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun tata

kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi hasil.

Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

berkontribusi, berkoordinasi, serta bekerjasama dalam proses penyusunan rencana

aksi ini. Diharapkan rencana aksi ini dapat dijadikan acuan bagi semua pihak dan

dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan

diharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak.

Parigi, 31 Januari 2025

Sekretaris DRRD

Drs. HERI GUSTARI, M.Si.

Pangkat: Pembina Utama, IV/c

NIP. 19680817 199301 1 001

i

DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	İ
DAFT	AR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1 1.2 1.3	Latar Belakang Dasar Hukum Struktur Organisasi Sekretariat DPRD	1
BAB I	I TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN	6
2.12.22.3	Tujuan dan Sasaran Strategis	6
BAB I	II PENGUKURAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA	11
3.1 3.2 3.3	Perjanjian Kinerja Indikator dan Target Kinerja Pengukuran Kinerja	11
BAB I	V PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT	19
4.1 4.2	Permasalahan	
BAB \	V PENUTUP	20
LAMP	PIRAN PENGUKURAN RENCANA AKSI TAHUN 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur. Setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Intruksi presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkanpelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud sebagai laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Oleh karena itu untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD maka disusun Rencana Aksi Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam menyusun rencana aksi atas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, yaitu sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
 Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 10. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evalusi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3 Seri Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat 3/103/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
- 14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

1.3 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menegaskan bahwa, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Pangandaran ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta tata Kerja Perangkat Daerah.

Dengan mengacu pada ketentuan dimaksud, maka tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

Tugas Sekretariat DPRD

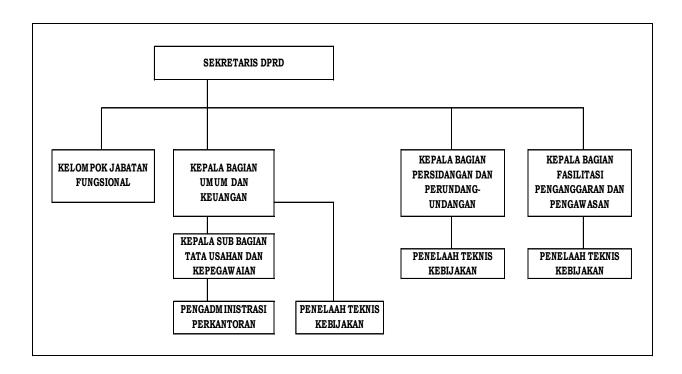
Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

2. Fungsi Sekretaris DPRD

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berikut merupakan susunan organisasi serta tata kerja di Sekretariat DPRD Kabupaten pangandaran sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta tata Kerja Perangkat Daerah:



Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran

No	Jabatan	Jumlah
1.	Sekretaris DPRD	1
2.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	-
3.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	1
4.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	1
6.	Kelompok Jabatan Fungsional	9
7.	Pengadministrasian Perkantoran	-
8.	Penelaah Teknis Kebijakan	7
	Jumlah	20

BAB II

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu "Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa". Untuk mewujudkan visi tersebut dituangkan dalam Misi Kabupaten Pangandaran di bidang pemerintahan yaitu "Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien dan Akuntabel".

Untuk mendukung visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran diatas makan disusunlah Tujuan dari Sekretariat DPRD yaitu "Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government) dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Cepat dan Responsif." Tujuan tersebut kemudian dijabarkan menjadi Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan Dan Sasaran Strategis

Visi : Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai				
Karakte	Bangsa			
MISI : Mewujudkan reformasi birokrasi ya	ng melayani, efektif, efisien, dan akuntabel			
Tujuan Sasaran				
Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja				
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Sekretariat DPRD			
(Good Government)				
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam			
yang cepat dan responsif rangka memfasilitasi setiap kegiatan				
Pimpinan dan Anggota DPRD				
	Kabupaten Pangandaran			

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan visi dan misi Sekretariat DPRD telah ditetapkan strategis dan arah kebijakan dapat dilihat sebagai berikut:

Strategi:

- 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).
- 2. Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD.

Arah Kebijakan:

- 1. Peningkatan penguatan akuntabilitas pemerintah akuntabilitas evaluasi kinerja dan atau instansi.
- 2. Efektifitas pelayanan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD akan melaksanakan sebanyak 2 Program dengan 18 Kegiatan dan 78 Sub Kegiatan pada Tahun 2025, yaitu:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 7 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - f. Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 6 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan 2 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 3 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 8 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 3 Sub Kegiatan yaitu:
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 7 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Mebel

- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan 3 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 10. Layanan Administrasi DPRD dengan 2 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Fasilitasi Fraksi DPRD
 - b. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan 5 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan
 Daerah
 - b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
 - 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan 6 Sub Kegiatan, yaitu
 - a. Pembahasan KUA dan PPAS
 - b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - c. Pembahasan APBD
 - d. Pembahasan APBD Perubahan
 - e. Pembahasan Laporan Semester
 - f. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan 7 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

- c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- e. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- f. Pengawasan Penggunaan Anggaran
- g. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 4. Peningkatan Kapasitas DPRD dengan 7 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Pendalaman Tugas DPRD
 - b. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - c. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - d. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - e. Penyusunan Program Kerja DPRD
- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan 3 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Kunjungan Kerja dalam Daerah
 - b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - c. Pelaksanaan Reses
- 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan 2 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyusunan Kode Etik DPRD
 - b. Pengawasan Kode Etik DPRD
- 7. Pembahasan Kerja Sama Daerah dengan 1 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
- 8. Fasilitasi Tugas DPRD dengan 5 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - d. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
 - e. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

BAB III

PENGUKURAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

3.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah suatu kesepakaan yang terukur antara pimpinan dan bawahan. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II Sekretariat DPRD berisi kesepakatan antara Sekretaris DPRD dengan Bupati Kabupaten Pangandaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran. Adapun isi perjanjian Kinerja tersebut antara lain:

Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai SAKIP Sekretariat	69,25
	Kinerja Sekretaris DPRD	DPRD	
2	Meningkatnya kualitas	Indeks Pelayanan Publik	2,66 -2,75
	pelayanan dalam rangka		
	memfasilitasi setiap kegiatan		
	Pimpinan dan Anggota DPRD		
	Kabupaten Pangandaran		

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 31.276.259.933,-	APBD TA 2025
	Kabupaten/Kota		2023
2	Program Dukungan	Rp 9.754.218.850,-	APBD TA
	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi		2025
	DPRD		
	Jumlah Anggaran	Rp 41.030.478.783,-	

3.2 Indikator dan Target Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja dalam rencana aksi menggambarkan ukuran keberhasilan instansi secara keseluruhan. Indikator kinerja instansi harus selaras antar tingkatan unit

organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai. Setelah menetapkan indikator kinerja kemudian ditetapkan target kinerja yang harus dicapai.

Berikut merupakan indikator dan target kinerja pada Sekretariat DPRD untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan.

Tabel 3.1 Indikator dan Target Program Kegiatan Sub Kegiatan

NO	i	PI	SASARAN STRATEGIS / ROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1			2	3	4	5
SEK	(RI	E.	TARIAT DPRD			
	Sa	as	aran Strategis :	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	69,25
				Nilai Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,66-2,75
	1	U	ROGRAM PENUNJANG RUSAN PEMERINTAHAN	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	95 %
		D	AERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Persen	95 %
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Persen	95 %
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persen	95 %
		1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen	9
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	"Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD"	Dokumen	1
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	"Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD"	Dokumen	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	"Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD"	Dokumen	1
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	"Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD"	Dokumen	1

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang tersusun dengan baik	Dokumen	57
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	23
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Dokumen	12
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	"Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang tersedia dalam kondisi baik"	Dokumen	43
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	96
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·

Sosialisasi Peraturan	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	Orang	46
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Perundang-Undangan" Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang Orang	50
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Dokumen	294
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	13
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	240
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Prasarana yang baik dan layak fungsi	Paket	29
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	26
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Disediakan	Laporan	1,532
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Yang Disusun Tepat Waktu	Laporan	1,400

	_		
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	120
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara	Unit	122
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	15
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	95
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	27
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah orang yang menerima layanan keuangan yang tersedia	Orang	120
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	40
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	1
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	40
Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan layanan administrasi DPRD yang tersedia	Laporan	72
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	60
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang telaksana dengan baik	Persen	70 %
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	Dokumen	24
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	9
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	9
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	2
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	4
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pembahasan Kebijakan anggaran yang tersusun	Dokumen	7
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	2
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun	Laporan	104
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	25
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	25
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan	Laporan	25

		Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		
Per	ngawasan Urusan merintahan Bidang rekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	25
Has Keu	ngawasan Tindak Lanjut sil Pemeriksaan Laporan uangan oleh Badan meriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1
	ngawasan Penggunaan ggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	2
Ket Per	mbahasan Laporan terangan tanggungjawaban Kepala erah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1
Peni	ngkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen peningkatan kapasitas DPRD	Dokumen	45
Per	ndalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	4
	nyediaan Kelompok Pakar n Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	12
Per Fra	nyediaan Tenaga Ahli ksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	6
	nyelenggaraan Hubungan syarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	28
Per DPI	nyusunan Program Kerja RD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1
Peng	yerapan dan ghimpunan Aspirasi yarakat	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang tersusun	Laporan	28
	njungan Kerja dalam erah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	24
	nyusunan Pokok-Pokok iran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1
Pel	aksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3
	ksanaan dan Pengawasan e Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang tersusun	Laporan	1
Per	nyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1
Per	ngawasan Kode Etik RD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1

Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah yang tersusun	Dokumen	33
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	33
Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD yang terlaksana	Dokumen	47
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	12
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	12
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	12
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	10

3.3 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator sasaran. Setelah dilaksanakan perhitungan maka didapatkan selisih kinerja. Terhadap selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala, setiap triwulanan dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja Instansi.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

4.1 Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD selama Tahun 2024 mengalami beberapa permasalahan diantaranya:

- Terdapat perbedaan realisasi kinerja dan realisasi keuangan dikarenakan ada bebrapa kegiatan yang dilaksanakan ada tahun 2024 tetapi belum terdapat realisasi keuangan.
- 2. Refocusing dan efisiensi anggaran berimbas pada keterbatasan pelaksanaan kegiatan.
- 3. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan secara maksimal disebabkan adanya keterbatasan keuangan.

4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut

Melihat kendala - kendala yang dihadapi pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran untuk tahun 2025 berusaha untuk membuat perencanaan kinerja agar pencapaian target untuk tahun 2025 dapat mendukung visi dan misi Kabupaten Pangandaran. Melihat adanya keterbatasan keuangan dan terdapatnya pelaksanaan kinerja yang tidak seimbang, maka Sekretariat DPRD melakukan beberapa langkah tindak lanjut, sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan koordinasi atau konsultasi secara daring untuk menghemat kegiatan koordinasi dan konsultasi.
- Melakukan penyesuaian rencana dan target pencapaian untuk tahun 2025 sesuai dengan adanya rasionalisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- 3. Melakukan koordinasi untuk membuat perencanaan kinerja yang dapat dicapai untuk tahun 2025.

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran ini

merupakan pedoman dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh pegawai di

lingkungan Sekretariat DPRD. Dengan adanya pengukuran rencana aksi ini

diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan kinerja instansi dan diharapkan

pegawai Sekretariat DPRD dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya pada akhir

tahun kepada atasannya dan masyarakat.

Pengukuran rencana aksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu upaya

untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian Rencana Aksi ini dibuat dengan harapan agar kinerja yang

direncanakan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Selain itu diperlukan komitmen

yang kuat dari seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran agar

pencapaian kinerja sesuai dengan target.

Parigi, 31 januari 2025

Sekretaris DPRD

Drs. HERI GUSTARI, M.Si.

Pangkat: Pembina Utama, IV/c

NIP. 19680817 199301 1 001

LAMPIRAN

RENCANA AKSI

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

N	SASARAN STRATEG		SATUAN	TARGET	PAGU	PENANGGUNG	RENCANA							l Keg		1			
O	PROGRAM / KEGIATAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		JAWAB	AKSI	OUTPUT	1	TW 1	3	4 !	/ 2 5 6		TW 3			W 4	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	<u> </u>		3	4 ;	, 0	10	0	9	10	11 12	11
SE	KRETARIAT DPRD				41,030,478,783														
	Sasaran Strategis :	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	69,25															
		Nilai Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,66-2,75															
	PROGRAM PENUNJA URUSAN PEMERINTA 1 DAERAH		Persen	95 %															
	KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Persen	95 %															
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Persen	95 %	31,276,259,933	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN													
		Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persen	95 %															
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Per 1 Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan kinerja angkat yang disusun tepat waktu	Dokumen	9	3,818,400														
	Penyusunan Doku Perencanaan Pera Daerah	ngkat Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	270,000	BAGIAN UMUM DAN	Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	5										
		Jumlah Dokumen Renja Tahun 2026 yang Tersusun	Dokumen	1		KEUANGAN	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2026	Kertas Kerja Renja 2026	5										

				Penginputan Rancangan Awal Renja 2026 di SIPD	Data	5								
				Penyusunan Rancangan Renja 2026	Kertas Kerja Renja-rincian belanja		5							
				Penyusunan Rancangan Akhir Renja 2026	Kertas Kerja Renja 2026			5						
				Penginputan Rancangan Akhir di SIPD	Data			5	5	5				
				Penyusunan Dokumen Renja 2026	Dokumen Renja 2026						5			
				Penggandaan Dokumen Renja 2026	Arsip Dokumen Renja 2026						5			
Jumlah Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 Yang Tersusun	Dokumen	1		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	5								
				Penyusunan Rancangan Awal Renja Perubahan 2025	Kertas Kerja Renja Perubahan 2025				5					
				Penginputan Rancangan Awal di SIPD	Data				5					
			BAGIAN UMUM DAN	Penyusunan Rancangan Renja Perubahan 2025	Kertas Kerja Perubahan Renja-rincian belanja				5					
				Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan	Kertas Kerja Perubahan Renja					5				
				Penginputan Rancangan Akhir Renja Perubahan 2025 di SIPD	Data					5	5			
				Penyusunan Dokumen Renja Perubahan 2025	Dokumen Renja Perubahan 2025						5 !	5		

						Penggandaan Dokumen Renja Perubahan dan pelaporan	Arsip Dokumen				5		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	"Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD"	Dokumen	1	330,000		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10					
						Melaksanakan koordinasi dan mengumpulkan data/informasi perencanaan perangkat daerah dengan PPTK masing - masing bagian sesuai dengan KUA PPAS 2026	Kertas kerja			15			
					BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menyusun Rancangan RKA 2026 Sekretariat DPRD untuk bahan rapat	Draft RKA 2026			10	10		
						Melaksanakan rapat kerja pembahasan RKA 2026	Draft RKA 2026 hasil Rapat dengan Komisi I dan Banggar			10	10		
						Menyempurnak an Rencana Kerja Anggaran 2026 Berdasarkan hasil Rapat Kerja	Data SIPD				30		
						Penetapan dan Penggandaan Dokumen RKA 2026	Dokumen RKA 2026				5		

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	"Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD"	Dokumen	1	330,000		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10	1				
						Melaksanakan koordinasi dan mengumpulkan data/informasi perencanaan perangkat daerah dengan PPTK masing - masing bagian	Kertas kerja				15		
					BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menyusun Rancangan Perubahan RKA 2025 Sekretariat DPRD untuk bahan rapat	Draft RKA				10	10	
						Melakukan Rapat Kerja Pembahasan Perubahan RKA 2025 dengan Komisi I dan Banggar	Draft RKA hasil Rapat dengan Komisi I dan Banggar				10	10	
						Menyempurnak an Perubahan Rencana Kerja Anggaran 2025 berdasarkan hasil Rapat Kerja	Data SIPD					30	
						Penetapan dan Penggandaan Dokumen RKA	Dokumen RKA					5	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	"Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD"	Dokumen	1	330,000	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10					
						Melaksanakan koordinasi dan	Kertas kerja					15	

							mengumpulkan data/informasi perencanaan perangkat daerah dengan PPTK masing - masing bagian								
							Menyusun Rancangan DPA 2026 Sekretariat DPRD untuk bahan rapat	Draft DPA				10			
							Melakukan Rapat Kerja Pembahasan Rencana Kerja APBD 2026 dengan Komisi I dan Banggar	Draft DPA hasil Rapat dengan Komisi I dan Banggar				Ę	5 5		
							Menyempurnak an DPA 2026 Berdasarkan Rapat Kerja	Data SIPD				1	0 10		
							Menyempurnak an DPA 2026 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur	Data SIPD					10	10	
							Menyampaikan DPA untuk disahkan	Dokumen DPA yang sdh dittd						10	
							Mendokumentas ikan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dengan keputusan kepala daerah	Laporan						5	
		"Jumlah Dokumen													
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD"	Dokumen	1	330,000	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10						

							Melaksanakan koordinasi dan mengumpulkan data/informasi perencanaan perangkat daerah dengan PPTK masing - masing bagian	Kertas kerja			10		
							Menyusun Rancangan DPA Perubahan 2025 Sekretariat DPRD untuk bahan rapat	Draft RKA			10		
							Melakukan Rapat Kerja Pembahasan Rencana Kerja APBDP 2025 dengan Komisi I dan Banggar	Draft RKA hasil Rapat dengan Komisi I dan Banggar			10		
							Menyempurnak an DPA Perubahan 2025 Berdasarkan hasil Rapat Kerja	Data SIPD			10	10	
							Menyempurnak an DPA Perubahan 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur	Data SIPD			10	10	
							Menyampaikan DPA Perubahan untuk disahkan 2025	Dokumen DPA yang sdh dittd				10	
							Mendokumentas ikan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dengan keputusan kepala daerah	Laporan				10	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	Dokumen	1	1,050,000	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10				

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			0			Menginput data Perencanaan di Sigenah	Dokumen SiGenah												
						Mengumpulkan data realisasi capaian kinerja triwulanan	Kertas Kerja Laporan Capaian Kinerja Triwulanan dan entri data sigenah	5	5	5	5	5	5	5	5 5	5	5	5	
						Verifikasi dan finalisasi data realisasi capaian kinerja triwulanan	Laporan Capaian KInerja Triwulanan			2.5			2.5		5			5	
						Mendokumentas ikan dokumen dan pelaporan kegiatan	Laporan Triwulanan			2.5			2.5		5			5	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1,178,400		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10											
						Mengumpulkan data capaian kinerja Tahun 2024 Sekretariat DPRD	Dokumen data Capaian Kinerja	20	20										
					BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menyusun Draft Laporan Kinerja Tahun 2024 Sekretariat DPRD	Draft Laporan Kinerja		20										
						Verifikasi dan finalisasi draft laporan kinerja Tahun 2024	Dokumen Laporan Kinerja 2024		10										
						Penetapan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024	Laporan Kinerja 2024 yg sudah ditandatangani			10									

						Mendokumentas ikan dokumen dan pelaporan kegiatan	Laporan Kinerja			10									
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang tersusun dengan baik	Dokumen	57	3,628,401,346															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	23	3,625,251,346		Mengidentifikasi perubahan dokumen kepegawaian	SKUMPTK	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2 :	2
						Membuat daftar gaji	Ledger Gaji	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
						Membuat SPP/SPM Gaji	Dokumen SPP/SPM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Membuat SI pembayaran gaji	SI	2	2	2	2	2.5	2.5	2.5	2.5 2	2.5 2	2.5	2.5 2	.5
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	870,000		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10											
						Mengumpulkan kebutuhan dana dari PPTK dan membuat Nota Pencairan Dana (NPD)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 (0.5 (0.5 (0.5 0	.5
					BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Membuat SI/BKU untuk pembayaran belanja												0.5 0	
					1125711137111	Menghitung pajak membuat e-Bupot pajak dan sts PHR		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						Memproses pembayaran belanja di ibc		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						Entri belanja di aplikasi SIPD Penatausahaan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						Menyusun dan mempersiapkan								1					1

		1					SPJ untuk				1						Ì	1			
							pengajuan GU														
							Memeriksa kelengkapan dokumen pertanggungjaw aban		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
							Mengajukan GU/TU untuk pencairan berikutnya		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
							Memverifikasi SPP SPM penatausahaan keuangan		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
							Pelaporan kegiatan penatasahaan	Laporan	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	990,000		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10												
							Melakukan koordinasi rekon keuangan dan aset akhir tahun 2024	Dokumen rekon	10												
						KEUANGAN	Membuat LRA LO Neraca dan LPE pada Aplikasi Ebend dan SIPD penatausahaan	Dokumen LRA, LO, Neraca dan LPE	20												
							Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun 2024 Sekretariat DPRD	Laporan Keuangan / CALK Sekretariat DPRD tahun 2024	20	20											
							Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan		10	10											

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	300,000		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	20											
						Mengkoordinasi kan kepimpinan hasil pemeriksaan			20										
					BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menindaklanjuti hasil pemeriksaan bersama pihak- pihak terkait				20									
						Menyusun hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan				15	15								
						Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan					10								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Dokumen	12	570,000		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10											
					BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Mengumpulkan data realisasi belanja bulanan		5	5	5	5 5	5 5	5	5	5	5	5	5	
						Menyusun laporan keuangan bulanan /triwulan/ semesteran					5	5	5			5			
						Menyusun dan mendokumentas ikan laporan hasil		0.5	0.5).5 (0.5 1	1	1	1	1	1	1	1	

						pelaksanaan kegiatan								
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	420,000		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	20						
						Mengumpulkan data Realisasi Anggaran					30			
					BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menyusun data laporan Prognosis Realisasi Anggaran					30			
						Menyusun dan mendokumentas ikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan					20			
						_								
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	"Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang tersedia dalam kondisi baik"	Dokumen	43	17,803,000										
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	17,203,000		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	20						
					BAGIAN UMUM DAN	Mengumpulkan data Barang Milik Daerah SKPD yang akan diasuransikan			20					
					KEUANGAN	Mengkoordinasi kan dan Melaksanakan Asuransi Barang Milik Daerah				30				
						Menyusun dan mendokumentas ikan laporan				30				

							hasil pelaksanaan kegiatan												
		Jumlah Laporan Penatausahaan																	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	2	600,000		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	20										
						BAGIAN UMUM DAN	Mengumpulkan data Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	2	2 2	2	2	2	2	2	2	2 2	
						KEUANGAN	Membuat Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD		2	2	2 2	2	2	2	2	2	2	2 2	
							Menyusun dan mendokumentas ikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan		2	2	2 2	2	2	2	2	2	2	2 10	
							in grading					-	_	_	_	_	_		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	96	300,133,200														
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	36,252,000		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen	10										
						BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Inventarisasi pegawai yang akan melaksanakan pendidikan dan pelatihan	Data	20										
							Menghitung biaya yang dibutuhkan dan mengajukan ke BP/BPP untuk kegiatan	Data					30						

							pendidikan dan								
						F F F E E T I I	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kegiatan				30			
							Membuat dan menyusun laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi pegawai					10			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan"	Orang	46	20,575,000	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menyusun KAK perencanaan	Dokumen	10						
							Inventarisasi kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan	Data		10		10			
							Inventarisasi peserta yang akan mengikuti kegiatan sosialisasi	Data		10		10			
							Pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang- undangan	Kegiatan			15		15		
							Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang- undangan	Laporan			10		10		

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	50	243,306,200		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen	10							
							Inventarisasi jumlah peserta yang akan melaksanakan bimbingan teknis implementasi perundan- undangan	Data		10		10				
							Menghitung biaya yang dibutuhkan dan mengajukan ke	Data		5		5				
							Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Kegiatan		2	20		20			
							Membuat dan menyusun laporan kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Laporan			10		10			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Dokumen	294	1,886,587,709											
	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Paket	1	43,136,038	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10							

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan											
							Menghitung biaya yang dibutuhkan dan mengajukan ke bendahara untuk kegiatan belanja Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Data	10				
							Melaksanakan Belanja Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Kegiatan	10	10	10	10	
							Menyusun Laporan	Laporan/SPJ	10	10	10	10	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	140,160,058		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10				
						BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menghitung biaya yang dibutuhkan dan mengajukan ke bendahara untuk kegiatan belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Data	10				
							Melaksanakan Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kegiatan	10	10	10	10	
							Menyusun Laporan	Laporan/SPJ	10	10	10	10	

Pe Ru	enyediaan Peralatan umah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	46,719,241		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10				
						BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menghitung biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan belanja Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Data	10				
							Melaksanakan Belanja Peralatan Rumah Tangga	Kegiatan	10	10	10	10	
							Menyusun Laporan	Laporan/SPJ	10	10	10	10	
	enyediaan Bahan gistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	223,327,000		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10				
							Menghitung biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan belanja Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Data	10				
							Melaksanakan Belanja Bahan Logistik Kantor	Kegiatan	10	10	10	10	
							Menyusun Laporan	Laporan/SPJ	10	10	10	10	
Ce	enyediaan Barang etakan dan enggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	172,890,400		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10				
						BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menghitung biaya yang dibutuhkan dan mengajukan ke bendahara untuk kegiatan belanja Barang Cetakan dan	Data	10				

					1	Penggandaan yang Disediakan						47					47	
						Melaksanakan Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		10			10		10			10		
						Menyusun Laporan	Laporan/SPJ	10		j	10		10		·	10		
												4	4				47	
Penyediaan Bahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	13	59,843,172		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10										
					BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menghitung biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Data	5										
						Melaksanakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Kegiatan	5	5	5 5	5 5	5 5	5 5	5	5 4	5 5	5 5	
						Menyusun	Laporan/SPJ				2 2		2 2			2 2		
											4		4			4	47	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	240	697,320,000		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10										
					BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	untuk kegiatan Fasilitasi Kunjungan	Data	5										
						Melaksanakan Fasilitasi	Kegiatan	5	5	5 5	5 5	5 5	5 5	5	5 !	5 5	5 5	

							Kunjungan Tamu												
							Menyusun Laporan	Laporan/SPJ	2	2	2 2	2 2	2 2	2 :	2 2	2	2	2	3
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	503,191,800		Penyusunan KAK perencanaan	Dokumen	10										
						BAGIAN UMUM DAN	Menghitung biaya untuk pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Data		5	5 (5 (5 5	5 (5				
						KEUANGAN	pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Orang		5	5	5	5 5	5 ;	5				
							Membuat dan menyusun laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan		5	5 !	5 4	5 5	5	5				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Prasarana yang baik dan layak fungsi	Paket	29	972,070,654														
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	140,728,240		Menyusun KAK	Dokumen	10										
						DACIAN LIMITA DA	Menyusun Dokumen Persiapan Pengadaan Mebel	Dokumen	10										
						BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Mebel	Kegiatan	30	30									
							Menyusun Laporan/ Dokumen Kontrak	Dokumen	10	10									

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	26	751,342,414		Menyusun KAK	Dokumen	10					
					BAGIAN UMUM DAN	Menyusun Dokumen Persiapan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dokumen	10					
						Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Mebel	Kegiatan	30	30				
						Menyusun Laporan/ Dokumen Kontrak	Dokumen	10	10				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	80,000,000		Menyusun KAK	Dokumen KAK	10					
					BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menyusun Dokumen Kontrak Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dokumen	10					
						Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Kegiatan	30	30				
						Menyusun Laporan dan Mengajukan	Dokumen	10	10				

						Dokumen Pembayaran													
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Disediakan	Laporan	1,532	3,374,262,000															
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Yang Disusun Tepat Waktu	Laporan	1,400	15,000,000		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen	10											
						Inventarisasi penyediaan jasa surat menyurat yang diperlukan		4		4	4		5			5			
					KELIANGAN	Fasilitasi perlengkapan jasa surat menyurat	Kegiatan	5	5	5 5	5 5	5 5	5	5	5	5	5	5	
						Membuat dan menyusun laporan pengadaan perlengkapan jas surat menyurat yang													
						telah dilaksanakan	Laporan	1	1	1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	638,690,000		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10											
					BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menghitung biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan Penyediaan													
						Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Data	6											
						Melaksanakan Penyediaan Jasa Komunikasi	Kegiatan	5	5	5 5	5 5	5 5	5	5	5	5	5	5	

							Sumber Daya Air dan Listrik														
							Menyusun Laporan	Laporan/SPJ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
							Laporari	Laporativoru							2	2	2	2	2 .	2	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	120	2,720,572,000		Menyusun KAK	Dokumen	10												
						BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menyusun Dokumen Persiapan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen	6												
							Pelaksanaan Kegiatan	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
							Menyusun Laporan/ Dokumen Kontrak	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara	Unit	122	797,428,580																
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	279,020,000		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10												
						BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menghitung biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Data	6												

							Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Menyusun Laporan	Kegiatan Laporan	5 2					5 5 2 2	5 2		5		5 2	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	197,870,000		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10											
						BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menghitung biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Data	6											
							Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kegiatan	5	5	5	5	5	5 5	5	5	5	5	5	
							Menyusun Laporan	Laporan	2	2	2	2	2 :	2 2	2	2	2	2	2	

Pe	emeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	15	15,000,000		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10											
							Menghitung biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan Pemeliharaan Mebel	Data	6											
							Melaksanakan Pemeliharaan Mebel	Kegiatan	5	5	5	5	5 5	5 5	5	5	5	5	5	
							Menyusun Laporan	Laporan	2	2	2	2	2 2	2	2	2	2	2	2	
		handah Danalatan dan																		
	emeliharaan Peralatan an Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	95	68,500,000		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10											
							Menghitung biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Data	6											
							Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kegiatan	5	5	5	5	5 5	5 5	5	5	5	5	5	
							Menyusun Laporan	Laporan	2	2	2	2	2 2	2	2	2	2	2	2	
	emeliharaan Aset Tak erwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	27	14,400,000		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10											
						BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menghitung biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Data	10											
							Melaksanakan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kegiatan	10			10		10)		10			

						Menyusun Laporan	Laporan	10			10		1	0		10			
Pemeliharaan/Rehabilita i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan s Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	Unit	3	101,238,580		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10											
					BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menghitung biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Data	6											
						Melaksanakan Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	5 5	5	5	5	5	
						Menyusun Laporan	Laporan	2	2	2	2	2	2 2	2 2	2	2	2	2	
Pemeliharaan/Rehabilit i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	Unit	3	121,400,000		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10											
					BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menghitung biaya yang dibutuhkan	Data	6											
						Melaksanakan Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan	Kegiatan	5	5	5	5	5	5 !	5 5	5	5	5	5	

						Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Menyusun Laporan	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2 :	2
Layanan Keuangan dan	Jumlah orang yang menerima layanan keuangan yang		120	19,730,355,044															
Resejahteraan DPRD Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	tersedia Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang Orang/Bulan	40	19,359,758,964		Mengidentifikasi perubahan dokumen kepegawaian		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2 :	
	3	J			BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN			2		2		2	2		2	2		2	
						Membuat SPP/SPM Gaji		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
						Membuat SI pembayaran gaji		2	2	2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5 2	.5
													V			V	,		
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	1	290,596,080		Menyusun KAK	Dokumen	10											
					BAGIAN UMUM DAN	Menyusun Dokumen Persiapan Pengadaan	Dokumen				10								
					KEUANGAN	Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan	Kegiatan				70								
						Menyusun Laporan/ Dokumen Kontrak	Dokumen				10								
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	40	80,000,000	DACIAN LIMITIA DAN	Penyusunan KAK perencanaan	Dokumen	10											
					BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Inventarisasi jumlah peserta medical check up	Data							10					

							Survey penyedia dan tempat pelaksanaan medical check up	Kegiatan						10						
							koordinasi dengan rumah sakit pelaksana medical check up	Kegiatan						10						
							pelaksanaan kegiatan medical check up	Kegiatan							50					
							Membuat laporan pelaksanaan medical check up DPRD	Laporan							10					
L	ayanan Administrasi PRD	Jumlah Laporan layanan administrasi DPRD yang tersedia	Laporan	72	565,400,000															
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	60	25,100,000		Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10											
							Menghitung biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD	Data	6											
							Melaksanakan Fasilitasi Fraksi DPRD	Kegiatan	5	5	5 5	5 5	5 5	5	5	5	5	5	5	
							Menyusun Laporan	Laporan	2	2	2 2	2 2	2 2	2	2	2	2	2	2	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	540,300,000	BAGIAN UMUM DAN	Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10											
						KEUANGAN	Menghitung biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan	Data	6											

							Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD												
							Melaksanakan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kegiatan	5	5	5 !	5 5	5	5	5	5 5	5	5	
							Menyusun Laporan	Laporan	2	2	2 2	2 2	2	2	2	2 2	2	2	
PE	ROGRAM DUKUNGAN ELAKSANAAN TUGAS AN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang telaksana dengan baik	Persen	70 %	9,754,218,850	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN PENGANGGARAN													
Pe	embentukan Peraturan aerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	Dokumen	24	1,457,891,300														
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	190,911,900	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN	Menyusun KAK	Dokumen KAK	10										
				1			Melaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan dan penjadwalan Pembahasan Propemperda	Dokumen persiapan pelaksanaan dan jadwal Pembahasan Propemperda						10					
				1			Menghimpun dan mengumpulkan Data Inventarisasi Masalah sebagai bahan penyusunan Propemperda	Dokumen Data Inventarisasi Masalah sebagai bahan penyusunan Propemperda						10					

	1		Rapat Bapemperda dengan Komisi I s/d IV dan AKD lainnya (Penyampaian Judul Raperda yang diusulkan dalam Propemperda)	Risalah Rapat terkait Judul Raperda yang diusulkan Komisi I s/d IV dan AKD lainnya sebagai bahan Propemperda		10	10	
	1		Rapat Bapemperda dengan Bagian Hukum dan SKPD lainnya (Pelaksanaan Pengkajian penyusunan Propemperda)	Risalah Rapat terkait Rancangan Perda yang akan diusulkan sebagai Inisiatif DPRD dan Usulan Pemda dalam penyusunan Propemperda)		10	10	
	1		Koordinasi dan Konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Barat/ Kanwil Kemenkum HAM Jawa Barat/ Daerah Kabupaten/Kota lain (Menyiapkan DIM dan administrasi lainnya)	Risalah rapat dan perjalanan dinas		10		
	2		Paripurna Pengambilan keputusan dan Penetapan Propemperda Tahun 2025 (Usulan Raperda yang akan diusulkan sebagai Inisiatif DPRD dan Usulan Pemda, Pandangan Umum Fraksi)	Dokumen Keputusan dan Penetapan Propemperda Tahun 2025 (Keputusan DPRD dan Nota Kesepahaman)			10	

		Jumlah Dokumen		1			penyusunan da penyampaian Laporan pelaksana Sub- Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Propemperda	Dokumen Laporan pelaksana Sub- Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Propemperda						10		
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	9	691,534,200		Menyusun KAK	Dokumen KAK	4							
							Melaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan dan penjadwalan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	Dokumen persiapan pelaksanaan dan jadwal Pembahasan Raperda		2						
						BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN	Melaksanakan Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Laporan Penyampaian Rancangan Perda, Pandangan Umum Fraksi, Draft Keputusan DPRD)	Risalah Rapat, Keputusan DPRD tentang Pansus yang membahas Raperda			2		2			
							Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Panitia Khusus DPRD	Risalah Rapat				2	2 2	2	2	
							Koordinasi dan Konsultasi	Risalah Rapat perjadin				10	1			

	Hukum Kemenk HAM DF Kabupa Iain (Menyia DIM dar adminis Iainnya)	kum PRD uten/Kota apkan n utrasi										
	Melaksa koordina dengan HukumS untuk Fa Raperda Guberni	asi Draft Raperda Bagian yang akan Setda diusulkan untuk asilitasi difasilitasi a ke Gubernur ur					2		2	2		
	Melaksa Rapat P Pembica Tingkat Penetap Raperda menjadi (Lapora Pansus, Keputus DPRD o Kesepa Bersam	Paripurna araan II pan a i Perda in , Draft san dan haman					2			2	2	
	Pengun Perda d Peratura peratura undanga lainnya JDIH	dan dokumentasi an hukum dan an- kegiatan an pembentukan	2	2 2	2	2	2 2	2	2	2	2	2
	Penyam Laporar Kegiatn	n Sub-	2	2 2	2	2	2 2	2	2	2	2	2

	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	Dokumen	2	18,694,000		Menyusun KAK	Dokumen KAK	15								
							Melaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan dan penjadwalan sub-Kegiatan Penyelenggaraa n Kajian Perundang- undangan	Dokumen persiapan pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan Kajian Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi dan lebih baru		5							
						BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN	Menghimpun dan mengumpulkan Data Inventarisasi Masalah sebagai bahan Kajian perundang- undangan	Menghasilkan Data Inventarisasi Masalah atas peraturan daerah dengan terbitnya peraturan perundang- undangan yang baru dan lebih tinggi		5		5		5		5	
							Mengumpulkan peraturan perundang- undangan untuk bahan kajian	Terkumpulnya data peraturan daerah yang sudah tidak relevan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih baru dan lebih tinggi		5		5		5		5	
							Melaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan fasilitasi rapat- rapat	Terfasilitasinya rapat kajian dengan lancar, Risalah rapat		5		5		5		5	
							Menyampaikan laporan hasil kegiatan	Laporan kegiatan			5		5		5	5	
Ш	Fasilitasi Penyusunan Dokumen persiapan pelaksanaan dan jadwal Pembahasan Raperda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau	Dokumen	4	556,751,200	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN	Menyusun KAK	Dokumen KAK	10								

Naskah Akademik yang Difasilitasi										
			Melaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan dan penjadwalan Penyusunan Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Rencana jadwal Penyusunan Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	5					
			Melaksanakan Kerjasama dengan Akademisi	Naskah Kerjasama penyusunan Aaskah Akademik	5					
			Menghimpun dan mengumpulkan peraturan perundang- undangan terkait Naskah Akademik yang akan disusun	Terhimpunnya peraturan perundang- undangan yang dibutuhkan dalam penyusunan NA		10				
			Pelaksanaan Rapat Bapemperda dengan Tim Penyusun terkait Judul Raperda yang diusulkan dalam Propemperda	Risalah Rapat Perjadin, Draft Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD		20	20			
			Pelaksanaan Seminar / Uji Publik penyusunan Naskah Akademik	Risalah rapat terkait masukan dari berbagai stakeholder untuk dijadikan bahan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda			10			
			Koordinasi dan Konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Barat/ Kanwil Kemenkum H	Risalah Rapat perjalanan dinas			10			

						AM Jawa Barat/ Daerah Kabupaten/Kota lain Pelaksanaaan Harmonisasi Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD	Risalah Rapat perjalanan dinas, Berita Acara Harmonisasi dan Naskah Akademik			5	5		
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pembahasan Kebijakan anggaran yang tersusun	Dokumen	7	1,283,480,800									
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	257,058,500		Menyusun KAK Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen KAK	10					
						Rapat Bamus terkait penyusunan jadwal Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen Hasil Rapat Bamus				10		
					BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN	Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I (Penjelasan Bupati, pandangan umum fraksi- fraksi dan jawaban Bupati tentang KUA dan PPAS)	Dokumen Risalah Rapat				10		
						Rapat Kerja komisi-komisi dengan SKPD terkait pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen Risalah Rapat				10		
						Rapat kerja Badan Anggaran dengan komisi-	Dokumen Risalah Rapat				10		

							komisi terkait pembahasan KUA dan PPAS							
							Rapat kerja Badan Anggaran dengan TAPD terkait pembahasan	Dokumen Risalah Rapat			20			
							Koordinasi dan konsultasi terkait pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen Perjadin			10			
							Rapat konsultasi Badan Anggaran dengan pimpinan fraksi- fraksi terkait pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen Risalah Rapat			10			
							Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat 2 (penyampaian laporan banggar terkait pembahasan KUA dan PPAS, penandatangan an DK dan Nota Kesepakatan)	Laporan Hasil Pembahasan dan			10			
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	257,153,050	BAGIAN FASILITASI	Menyusun KAK Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		0					
						PENGAWASAN PENGANGGARAN	Rapat Bamus terkait penyusunan jadwal pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Dokumen Hasil Rapat Bamus				10		

	Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I (Penjelasan Bupati Pandangan umum fraksi- fraksi dan Jawaban Bupati tentang perubahan KUA dan Perubahan PPAS) Dokumen Risa	lah 10
	Rapat kerja komisi-komisi dengan SKPD terkait Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Dokumen Risa Rapat	lah 10
	Rapat kerja Badan Anggaran dengan TAPD dan SKPD terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS Rapat	lah 10
	Rapat kerja Badan Anggaran dengan pimpinan fraksi- fraksi dan komisi terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS Dokumen Risa	lah 20
	Koordinasi dan konsultasi terkait pembahasan perubahan KUA dan perubahan Dokumen PPAS Perjadin	10
	Rapat konsultasi Badan Anggaran dengan Dokumen Risa pimpinan Fraksi-	lah 10

							Fraksi dan pimpinan komisi terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II (penyampaian laporan banggar, pengambilan keputusan dan penandatangan an SK dan Nota Kesepakatan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS)	Laporan Hasil Pembahasan dan Nota Kesepakatan			10			
		Jumlah Dokumen Hasil		1	260,062,400		Menyusun KAK pembahasan							
	Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	Dokumen				APBD Rapat Bamus terkait penyusunan jadwal Pembahasan APBD	Dokumen KAK Dokumen Hasil Rapat Bamus	5			10		
						BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN PENGANGGARAN	Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I (Penjelasan Bupati, pandangan umum fraksi- fraksi dan jawaban Bupati)	Dokumen Risalah Rapat				10		
							Rapat kerja komisi-komisi dengan SKPD terkait pembahasan APBD	Dokumen Risalah Rapat				10		
							Rapat kerja Badan Anggaran dengan TAPD	Dokumen Risalah Rapat				10		

	dan SKPD terkait pembahasan APBD		
	Rapat kerja Badan Anggaran dengan pimpinan komisi terkait pembahasan APBD	Dokumen Risalah Rapat	20
	APBD	Dokumen Perjadin	10
	Rapat konsultasi Badan Anggaran dengan pimpinan fraksi- fraksi dan komisi terkait pembahasan APBD	Dokumen Risalah Rapat	10
	akhir Bupati terkait APBD)	Laporan Hasil Pembahasan SK dan Berita Acara	10
	Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD terkait Penyempurnaan Hasil Evaluasi	Dokumen Risalah Rapat	5

	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	257,062,400		Menyusun KAK pembahasan perubahan APBD	Dokumen KAK	5			
							Rapat Bamus terkait penyusunan jadwal pembahasan perubahan APBD	Dokumen Hasil Rapat Bamus			10	
							Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I (penjelasan Bupati, pandangan umum fraksi- fraksi dan jawaban Bupati terkait Perubahan APBD)	Dokumen Risalah Rapat			10	
						BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN PENGANGGARAN	Rapat kerja komisi-komisi dengan SKPD terkait perubahan APBD Perubahan	Dokumen Risalah Rapat			10	
							Rapat kerja Badan Anggaran dengan TAPD dan SKPD terkait perubahan APBD	Dokumen Risalah Rapat			10	
							Rapat kerja Badan Anggaran dengan pimpinan komisi dan pimpinan fraksi-fraksi terkait perubahan APBD	Dokumen Risalah Rapat			20	
							Koordinasi dan konsultasi terkait	Dokumen Risalah Rapat			10	

							pembahasan APBD Perubahan Rapat konsultasi Badan Anggaran dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi dan komisi terkait perubahan APBD Rapat paripurna pembicaraan tingakt II (penyampaian laporan banggar,	Dokumen Perjadin				10		
							pengambilan keputusan dan penandatangan SK dan BA serta pendapat akhir Bupati terkait perubahan APBD)	Laporan Hasil Pembahasan SK dan Berita Acara				10		
							Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD terkait Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat	Dokumen Risalah Rapat				5		
		Jumlah Dokumen												
	Pembahasan Laporan Semester	Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	2	1,900,000	BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN	Menyusun KAK pembahasan laporan semester	Dokumen KAK	10					
							Rapat Bamus terkait penyusunan jadwal Pembahasan				10		10	

						Laporan							
						Rapat Kerja Komisi-komisi dengan SKPD terkait dalam rangka membahas dan mengevaluasi Laporan Semester	Laporan komisi				15	15	
						Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-komisi terkait hasil pembahasan Laporan Semester	Laporan Badan Anggaran				10	10	
						Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD terkait hasil pembahasan Laporan Semester	Saran dan Pendapat DPRD				10	10	
						14014							
Pembahasan Pertanggungjawabar APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	250,244,450		Menyusun KAK pembahasan Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD	Dokumen KAK	10					
					BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN PENGANGGARAN	Rapat Bamus terkait penyusunan jadwal Pembahasan Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD	Dokumen Hasil Rapat Bamus			10			
						Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I (Penjelasan Bupati,	Dokumen Risalah Rapat			10			

	pandangan umum fraksi- fraksi dan Jawaban Bupati terkait Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD)		
	Rapat kerja Badan Anggaran dengan TAPD dan SKPD terkait pembahasan Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD	Dokumen Risalah Rapat	10
	Koordinasi dan Konsultasi terkait Pembahasan Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD	Dokumen Perjadin	20
	Rapat Konsultasi Badan Anggaran dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi terkait pembahasan Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD	Dokumen Risalah Rapat	20
	Rapat Paripurna Penetapan Persetujuan DPRD Kabupaten	Laporan Hasil Pembahasan SK dan Berita Acara	10

							terkait pembahasan Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD terkait Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat	Dokumen Risalah Rapat					10						
F	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun	Laporan	104	613,489,050														
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	25	32,596,000		Menyusun KAK Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Dokumen KAK	7										
						BAGIAN FASILITASI	Rapat Kerja Internal terkait Penyusunan Rencana Kerja	Dokumen Renja Komisi	5										
						PENGAWASAN PENGANGGARAN	Rapat Kerja Komisi dengan SKPD terkait	Dokumen Hasil Rapat	2	2	2 :	2 2	2 2	2	2	2	2	2 2	,
							Melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Dokumen Perjadin	2	2	2 :	2 2	2 2	2	2	2	2	2 2	2
							Rapat Kerja Internal terkait Penyusunan Laporan Kinerja Komisi	Laporan Kinerja Komisi			2	20						2	0
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	25	32,596,000	BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN PENGANGGARAN	Menyusun KAK Pengawasan Urusan Pemerintahan	Dokumen KAK	7										

							Bidang													
							Infrastruktur Rapat Kerja Internal terkait Penyusunan Rencana Kerja	Dokumen Renja Komisi	5											
							Rapat Kerja Komisi dengan SKPD terkait	Dokumen Hasil Rapat	2	2	2	2	2	2	2 2	2	2	2	2	
							Melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Dokumen Perjadin	2	2	2	2	2	2	2 2	. 2	2	2	2	
							Rapat Kerja Internal terkait Penyusunan Laporan Kinerja Komisi	Laporan Kinerja Komisi			:	20							20	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	25	32,596,000		Menyusun KAK Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Dokumen KAK	7											
						BAGIAN FASILITASI	Rapat Kerja Internal terkait Penyusunan Rencana Kerja	Dokumen Renja Komisi	5											
						PENGAWASAN PENGANGGARAN	Rapat Kerja Komisi dengan SKPD terkait	Dokumen Hasil Rapat	2	2	2	2	2	2	2 2	2	2	2	2	
							Melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Dokumen Perjadin	2	2	2	2	2	2	2 2	. 2	2	2	2	
							Rapat Kerja Internal terkait Penyusunan Laporan Kinerja Komisi	Laporan Kinerja Komisi				20							20	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	25	32,596,000	BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN PENGANGGARAN	Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	7											

	1	1					1			1	- 1		1	1			1	1		
							Rapat Kerja Internal terkait													
							Penyusunan Rencana Kerja	Dokumen Renja Komisi	5											
							Rapat Kerja Komisi dengan SKPD terkait	Dokumen Hasil Rapat	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2 2	
							Melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Dokumen Perjadin	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2 2	!
							Rapat Kerja Internal terkait Penyusunan Laporan Kinerja Komisi	Laporan Kinerja Komisi				20							20	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	230,860,600		Menyusun KAK Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen KAK	10											
							Rapat Bamus terkait jadwal pembahasan LHP	Dokumen Hasil Rapat Bamus			10									
						PENGAWASAN	Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus	Dokumen Hasil Rapat			10									
							Rapat Kerja Pansus dengan TAPD terkait LHP	Dokumen Hasil Rapat			30									
							Koordinasi dan Konsultasi Pansus terkait pembahasan LHP	Dokumen perjadin			20									
							Rapat Paripurna Penetapan Rekomendasi DPRD terhadap LHP				10									

							Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LHP			10)				
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	2	2,000,000		Menyusun KAK Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen KAK	10						
							Rapat Bamus terkait jadwal Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen Hasil Rapat Bamus				20			
						BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN PENGANGGARAN	Rapat Kerja Badan Anggaran terkait Pengawasan Penggunaan Anggaran Semester I	Dokumen Risalah Rapat				30			
							Koordinasi dan Konsultasi terkait Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen Perjadin				30			
							Rapat Kerja Badan Anggaran terkait Pengawasan Penggunaan Anggaran Semester 2	Dokumen Risalah Rapat				10			
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1	250,244,450	BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN PENGANGGARAN	Menyusun KAK Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjaw aban Kepala Daerah	Dokumen KAK	10						
							Rapat Bamus terkait jadwal	Dokumen Hasil Rapat Bamus		10					

							pembahasan LKPJ			Ì				Ì				Ì			
							Rapat Paripurna Pembentukan	Dokumen Hasil Rapat			10										
							Rapat Kerja Pansus dengan TAPD terkait LKPJ	Dokumen Hasil Rapat			30										
							Koordinasi dan Konsultasi terkait pembahasan LKPJ	Dokumen perjadin			20										
							Rapat Paripurna Penetapan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ				10										
							Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ	Dokumen Hasil Rapat			10										
F	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen peningkatan kapasitas DPRD	Dokumen	45	1,841,559,400																
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	4	1,379,744,400		penyusunan KAK	dokumen	10												
						BAGIAN PERSIDANGAN	MOU dengan perguruan tinggi	kegiatan	6												
							pelaksanaan bimbingan teknis	kegiatan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
							pembuatan laporan hasil bimtek	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2 :	2	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	12	30,000,000	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN	Penyusunan KAK	dokumen	4												

						koordinasi mengenai kebutuhan tim				_									
						ahli pelaksanaan	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2 2	2 2	2
						rapat kerja dengan tim ahli	kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2 2	2
						SPJ Honor Tim ahli	dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 4	4
Penyediaan Tena Fraksi	ga Ahli Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	6	210,000,000		penyusunan KAK	dokumen	10											
					BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN	penyusunan draft SK TA Fraksi berdasarkan Surat Rekomendasi Fraksi	dokumen	30											
						pelaksanaan pembayaran belanja TA Fraksi	laporan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5 !	5 5	5
Penyelenggaraan Hubungan Masya	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan akat Masyarakat	Dokumen	28	217,590,000	BAGIAN	Penyusunan KAK	Dokumen	10											
					PERSIDANGAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN	Pelaksanaan kegiatan Rapat Penerimaan Audiensi	Dokumen	5	5	5	5	5	5	5	5				
						Penyusunan laporan audiensi	Dokumen	5	5	5	5	5	5	5	5				
Penyusunan Prog Kerja DPRD	Jumlah Dokumen ram Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	4,225,000		Penyusunan KAK	dokumen	10											
					BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN	pelaksanaan Rapat Bamus penjadwalan pelaksanaan Paripurna Penetapan Renja DPRD	kegiatan									40			

						pelaksanaan Paripurna Penetapan Renja dprd pembuatan laporan kegiatan paripurna penetana renja DPRD	kegiatan kegiatan									10			
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang tersusun	Laporan	28	1,422,546,000															
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	24	64,924,000		Menyusun KAK Kunjungan Kerja dalam Daerah	Dokumen KAK	16											
					BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN	Pelaksanaan Kegiatan		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5 5	5	
					PENGANGGARAN	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2 2	2	
Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1	11,000,000		Menyusun KAK Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dokumen KAK	10											
					BAGIAN FASILITASI	Pengumpulan Daftar Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dokumen Daftar Usulan Pokir	5	5										
					PENGAWASAN PENGANGGARAN	Penginputan Daftar Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			10										
						Verifikasi Daftar Usulan Pokok- Pokok Pikiran DPRD oleh		5	5										

					Sekretariat DPRD								
					Verifikasi Daftar Usulan Pokok- Pokok Pikiran DPRD oleh Mitra Bappeda		5	5					
					Verifikasi Daftar Usulan Pokok- Pokok Pikiran DPRD oleh SKPD		5	5					
					Penyelarasan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada Rancangan Renja PD		5	5					
					Rapat Kerja Badan Anggaran terkait Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dokumen Hasil Rapat Bamus	5	5					
					Verifikasi Daftar Usulan Pokok- Pokok Pikiran DPRD oleh TAPD Perencana		5	5					
Pelaksanaan	Jumah Dokur Hasil Reses Pelaksanaan	3	1,346,622,000		Menyusun KAK pelaksanaan Reses	Dokumen KAK	10						
				BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN PENGANGGARAN	Rapat Bamus terkait penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan Reses	Dokumen Hasil Rapat Bamus	10		10		10		
				LINGANGGARAN	Pelaksanaan kegiatan reses	Dokumen SPJ	10		10		10		
					Rapat paripurna tentang penyampaian laporan kegiatan Reses	Laporan Hasil	10		10		10		

Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang tersusun		1	209,980,000									
			0										
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	104,164,000		Menyusun KAK penyusunan kode etik DPRD	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	10					
					BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN PENGANGGARAN Ko Pe Ko Ra Int	Penyusunan Rencana Kerja melalui Rapat Kerja Internal Badan Kehormatan	Rencana Kerja AKD	50					
						Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Kode Etik DPRD	Dokumen Risalah Rapat/Perjadin	30					
						Rapat Kerja Internal terkait Penyusunan Laporan Kinerja	Laporan Kinerja AKD	10					
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	105,816,000		Menyusun KAK pengawasan kode etik DPRD	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	10					
					BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN PENGANGGARAN	Penyusunan Rencana Kerja melalui Rapat Kerja Internal Badan Kehormatan	Rencana Kerja AKD	50					
						Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen Risalah Rapat/Perjadin		30				
						Rapat Kerja Internal terkait Penyusunan Laporan Kinerja	Laporan Kinerja AKD		10				

	lumalah Dalumusu					1			1	1	I		i i		1	1											
	Jumlah Dokumen Pembahasan Kerja																										
Pembahasan Kerja Sama	Sama Daerah yang		33	639,000,000																							
Daerah	tersusun	Dokumen																									
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	33	639,000,000		Menyusun KAK penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	5																			
					BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN PENGANGGARAN PI (n														Menyusun draft MoU dengan pihak ketiga (media) Draft MoU 20								
						Penandatangan an MoU dengan pihak ketiga (media)	MoU	5																			
						Pelaksanaan kegiatan (Penerbitan Berita di Media yg Bekerjasama)	Dokumen SPJ	10	10	10	10	10	10	10													
Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD yang terlaksana	Dokumen	47	2,286,272,300																							
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	12	1,078,967,400		Menyusun KAK	dokumen kak	10																			
					BAGIAN PERSIDANGAN	Pelaksanaan Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi Komisi - Komisi	Dokumen	10		10			10														
					DAN PERUNDANG- UNDANGAN	Pelaksanaan Kunjungan Kerja Luar Daerah Luar Provinsi Komisi-Komisi	Dokumen	10		10			10														
						Penyusunan laporan kunjungan kerja komisi		10		10			10														

						dalam/luar provinsi											
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1	4,210,000		penyusunan KAK Sub Kegiatan Penyusunan Laporan kinerja	dokumen	10									
						pelaksanaan rapat badan musyawarah	kegiatan										20
					BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN	membuat surat undangan rapat paripurna penyampaian laporan kinerja sesuai dengan hasil rapat badan musyawarah	dokumen										30
					UNDANGAN	pelaksanaan rapat paripurna penyampaian laporan kinerja AKD DPRD Tahun 2024	kegiatan										20
						membuat laporan kegiatan rapat paripurna mengenai penyampaian laporan kinerja AKD DPRD Tahun 2024	kegiatan										20
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	12	240,323,500	DAG!!!!	Penyusunan KAK	dokumen	16									
					BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN	pelaksanaan kegiatan Badan Musyawarah	kegiatan	5	5 5	5 5	5	5	5	5 5	5 5	5	5
					SINDAINOAN	membuat laporan hasil Rapat Badan Musyawarah	dokumen	2	2 2	2 2	2	2	2	2 2	2 2	2	2

	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	12	711,017,900		Menyusun KAK	dokumen	16								
							Melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah / Koordinasi Konsultasi Pimpinan DPRD		5	5	5	5	5	5	5		
						BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN	Melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah oleh Pimpinan DPRD dalam rangka menghadiri undangan	Dokumen	5	5	5	5	5	5	5		
							Menyusun laporan kunjungan kerja luar daerah/koordina si konsultasi pimpinan DPRD		2	2	2	2	2	2	2		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	10	251,753,500		Menyusun KAK	Dokumen KAK	5								
							Penerimaan surat dari Pemda atau pihak lain	Dokumen	5	5							
						BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN	Penetapan Keputusan DPRD tentang pembentukan Pansus melalui Rapat Paripurna	Dokumen risalah rapat	4		4						
							Penjadwalan/ penyusunan agenda pembahasan oleh Pansus	agenda pembahasan oleh Pansus	4								
							Pembahasan oleh Pansus	Risalah Rapat dan kegiatan perjalanan dinas	10	10 1	0 1	10 1	10	10			

	Laporan Pansus ke Pimpinan DPRD terkait hasil pembahasan Pansus	dokumen 4	
	Penetapan Keputusan DPRD melalui Rapat Paripurna atas hasil pembahasan Pansus	dokumen 4	
	Membuat laporan hasil kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	dokumen	5

Parigi, 31 Januari 2025 Sekretaris DPRD

Drs. HERI GUSTARI, M.Si. Pangkat: Pembina Utama, IV/c NIP. 19680817 199301 1 001